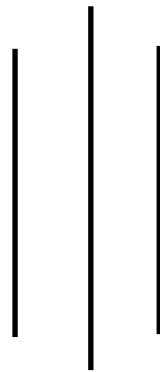




**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
KECAMATAN SIANTAR BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025**



**PEMERINTAH KOTA
PEMATANGSIANTAR
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, telah tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Siantar Barat Tahun 2025 menguraikan pencapaian kinerja tahun sebelumnya dan juga merupakan media pertanggungjawaban keberhasilan dan atau beberapa kinerja yang belum tercapai secara maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam pencapaian Visi dan Misi organisasi sesuai Rencana Kinerja yang telah di tetapkan.

Substansi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai instrumen untuk menginformasikan pencapaian kinerja Kecamatan Siantar Barat dalam Tahun 2025 yang menyangkut tentang proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2025, yang sekaligus merupakan mata rantai pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.

Dengan telah tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya LAKIP ini, semoga bermanfaat dan berguna untuk pelaksanaan tugas-tugas dan semakin memacu kinerja Kecamatan Siantar Barat dimasa yang akan datang. Namun kami menyadari dalam pembuatan dan atau penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini ada beberapa kesalahan dan kekurangan yang akan kami perbaiki dengan komitmen penuh dari seluruh *stakeholders* dan komponen yang ada di Kecamatan Siantar Barat.

Pematangsiantar, Februari 2026
CAMAT SIANTAR BARAT



HERWAN A.R.SARAGIH, SH
PENATA TK I
NIP. 19711225 200604 1 008



PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Siatas Barita No. 33 Pematangsiantar
email : inspektorat@pematangsiantar.go.id

CATATAN HASIL REVIU

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA KECAMATAN SIANTAR BARAT
KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2025**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Perintah Tugas Plt. Inspektur Daerah Kota Pematangsiantar Nomor : 005/800.1.11.1/132/II-2026 tanggal 19 Februari 2026 untuk Melakukan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2025, dengan ini kami sampaikan Catatan Hasil Reviu sebagai berikut :

1. Tujuan Reviu

Tujuan reviu adalah untuk :

- a. Membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- b. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup reviu meliputi:

- a. Format laporan,
- b. Mekanisme penyusunan laporan, dan
- c. Substansi laporan.

3. Objek Reviu

Laporan Kinerja Kecamatan Siantar Barat Pematangsiantar Tahun 2025.

4. Simpulan dan Rekomendasi

a. Simpulan

1) Format

Kesimpulan terhadap format Laporan Kinerja Pemerintah (LKj) Kecamatan Siantar Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a) LKj telah menampilkan data penting instansi pemerintah.
- b) LKj telah menyajikan informasi target kinerja.
- c) LKj telah menyajikan capaian kinerja yang memadai.
- d) LKj telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan.
- e) LKj telah menyajikan upaya perbaikan ke depan.
- f) LKj telah menyajikan akuntabilitas keuangan.

2) Mekanisme Penyusunan

Kesimpulan terhadap mekanisme penyusunan laporan kinerja Kecamatan Siantar Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a) Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai;
- b) Mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj belum memadai karena **belum adanya SOP** yang berisi mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj;
- c) Penanggung jawab pengumpulan data/informasi **belum ditetapkan**.
- d) Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya.
- e) LKj bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya, namun demikian, masih terdapat beberapa **catatan/ kelemahan yang perlu dilakukan koreksi dan perbaikan**, yaitu:
 - 1) Tidak ada bukti dokumen yang mendukung pengukuran kinerja secara bulanan;
 - 2) Tidak dapat ditelusuri sampai unit dibawahnya.

3) Substansi

Kesimpulan terhadap substansi laporan kinerja Kecamatan Siantar Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a) Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.
- b) Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Renstra;
- c) Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama;
- d) LKj telah memuat perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- e) LKj telah memuat perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- f) LKj telah memuat perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- g) LKj belum menyajikan sub judul perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
- h) LKj telah memuat analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- i) LKj telah memuat analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, namun **terdapat ketidaksesuaian** data pada tabel 3.5 Capaian Kinerja Kecamatan Siantar Barat Tahun 2025 tidak dilengkapi dengan kolom anggaran yang terdiri dari target, realisasi, capaian, dan tabel 3.6 Efisiensi Per Indikator Kinerja

Kecamatan Siantar Barat Tahun 2025 untuk perhitungan rumus efisiensi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) jumlah seharusnya adalah 6,15. Perhitungan capaian kinerja tetap dihitung 100 bukan 100,15. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penyajian data, sehingga dapat mempengaruhi keakuratan analisis dan penilaian kinerja;

- j) LKj telah memuat analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
- k) Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci telah memenuhi kriteria yaitu spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu/ berkesinambungan.

b. Rekomendasi

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami rekomendasikan kepada Kepala Kecamatan Siantar Barat sebagai berikut:

- 1) Agar memperbaiki mekanisme pengumpulan data kinerja dengan membuat dan melaksanakan SOP Pengumuman data kinerja serta optimalisasi monitoring kinerja secara berkala, sehingga data kinerja yang dihasilkan dapat lebih diandalkan.
- 2) Agar melakukan evaluasi program/kegiatan dengan menitikberatkan pada *outcome* yang dicapai sehingga dapat menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan/sasaran Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan kemudian menentukan langkah perbaikan kedepan.
- 3) Agar menambahkan subjudul perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi. Dalam hal tidak terdapat standar nasional maupun provinsi yang relevan, agar dicantumkan keterangan bahwa perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional dan provinsi tidak dapat dibandingkan.

Tanggung jawab kami terbatas pada hasil revidi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar.

Pematangsiantar, Maret 2026

PENGENDALI TEKNIS


Dra. RIAMAULI SIDABUTAR
PEMBINA
NIP. 19670201 199303 2 003


CAMAT SIANTAR BARAT

HERWAN A.R. SARAGIH, S.H.
PEMBINA Tk. I
NIP. 19711225 200604 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Penjelasan Umum Organisasi	1
1.2. Aspek Strategis Organisasi	2
1.3. Permasalahan Umum (Isu Strategis)	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
2.1. Ikhtisar Perjanjian Kinerja	11
2.2. Indikator Kinerja Utama	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	14
3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini	14
3.1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu	14
3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	15
3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional (Jika Ada)	15
3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternative Solusi yang telah dilakukan.....	15
3.1.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	17
3.1.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	22
3.2. Realisasi Anggaran	24
BAB IV PENUTUP.....	28
LAMPIRAN.....	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Penjelasan Umum Organisasi

Pada awalnya Kota Pematangsiantar merupakan Kotamadya Pematangsiantar yang pada waktu itu belum terbentuk wilayah Kecamatan dan masih langsung membawahi 29 desa. Pada tahun 1981 direncanakan pembentukan wilayah Kecamatan yang di sebut dengan Koordinator Pemerintahan Kelurahan Siantar Barat terlaksana dari tanggal 25 April 1981 sampai dengan tanggal 26 Maret 1982.

Kemudian dengan keluarnya Peraturan Menteri dalam negeri nomor 35 tertanggal 21 oktober 1981, maka wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Pematagsiantar dibagi dan dibentuk 4 wilayah kecamatan yang peresmiannya berlangsung pada tanggal 17 Maret 1982 oleh Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I SUMUT atas nama Menteri Dalam Negeri yang salah satunya adalah wilayah Kecamatan Siantar Barat.

Dalam peningkatan dan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih, transparan, akuntabel dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut sebagai pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Siantar Barat selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut untuk melakukan inovasi didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah salah satu kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan kinerja dan pembenahan dalam

peningkatan kinerja Kecamatan. Inovasi dan Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam pelayanan kepada masyarakat berdasarkan peraturan perundangan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Siantar Barat yaitu Peraturan Wali Kota Pematagsiantar Nomor 27 Tahun 2022, tentang susunan organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematagsiantar.

a. Data Geografis Wilayah

Kecamatan Siantar Barat terletak pada 3.01°-2,54° Lintang utara dan 99°14' 0,44" Bujur timur. Kecamatan Siantar Barat merupakan kecamatan dengan luas wilayah 3,21 km² yang terdiri dari 8 (delapan) Kelurahan.

Tabel 1.3.1
Luas Wilayah
Menurut Kelurahan Tahun 2025

No	Kelurahan	Luas Wilayah km ²	Persentase terhadap luas Kecamatan
1	Dwikora	0,26	8,10
2	Proklamasi	0,38	11,84
3	Teladan	0,26	11,21
4	Banjar	0,36	11,21
5	Bantan	0,68	21,18
6	Simarito	0,42	13,08
7	Sippinggol-pinggol	0,37	11,53
8	Timbang Galung	0,38	11,84
Jumlah		3,21	100

Sumber: Siantar Barat dalam angka 2025

Kecamatan Siantar Barat mempunyai batas-batas wilayah administratif sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan kelurahan Simalungun Kecamatan Siantar Selatan
- c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari

Kecamatan Siantar Barat berada di pusat kota Pematng Siantar, terletak pada ketinggian elevasi berkisar antara 370-1100 m di atas permukaan laut, dengan bentuk wilayah dataran dan berbukit, beriklim sedang (sub tropis) dengan suhu rata-rata 23^oC-32^oC/tahun.

b. Jumlah Penduduk

Kecamatan Siantar Barat merupakan kecamatan yang memiliki penduduk yang heterogen dan majemuk terdiri dari berbagai suku dan agama. Pada tahun 2025 jumlah penduduk di Kecamatan Siantar Barat berjumlah 39.770 jiwa. Hal ini didukung dengan letaknya yang sangat startegis dengan luas wilayah sebesar 3.205 km yang merupakan wilayah perlintasan mobilitas penduduk ke daerah lain seperti ke Parapat, Tarutung, Tanah Karo, Tebing Tinggi dan Medan.

Berdasarkan klasifikasi jenis kelamin, jumlah penduduk Kecamatan Siantar Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3.2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kelurahan Tahun 2025

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Dwikora	1.166	1.297	2.463
2	Proklamasi	829	943	1.772
3	Teladan	1.048	1.132	2.180
4	Banjar	2.966	2.919	5.885

5	Bantan	6.073	6.160	12.233
6	Simarito	3.485	3.555	7.040
7	Sipinggol-pinggol	2.278	2.442	4.773
8	Timbang Galung	1.701	1.776	3.477
Jumlah		19.546	20.165	39.770

Sumber: Siantar Barat dalam angka 2025

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk terbanyak berada di wilayah kelurahan Bantan dengan jumlah penduduk sebanyak 15.118 jiwa dan penduduk yang paling sedikit berada di kelurahan Proklamasi sebanyak 2.282 jiwa.

c. Data Kepegawaian

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Siantar Barat terdapat Sumber Daya Manusia (SDM) serta sarana prasarana antara lain:

1. SDM (Sumber Daya Manusia)

Adapun jumlah SDM pada Kecamatan Siantar Barat adalah sebagai berikut:

- Jumlah Pegawai Negeri Sipil, PPPPK, THL

Tabel 1.3.4
Jumlah Pegawai Kecamatan Siantar Barat
Tahun 2025

NO	Uraian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	63 Orang
2	PPPK	18 Orang
3	PPPK Paruh Waktu	1 Orang
4	THL Kecamatan Dan Kelurahan	86 Orang
Jumlah		168 Orang

Sumber : Data Kasubbag Umum dan Kepegawai Kecamatan Siantar Barat Tahun 2025

- Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Tabel 1.3.5
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Tahun 2025

NO	PENDIDIKAN	PNS	PPPK	THL	TOTAL
1	Strata II / S2	2 Orang	- Orang	- Orang	2 Orang
2	Strata I / S1	40 Orang	4 Orang	2 Orang	46 Orang
3	Diploma III / D III	3 Orang	1 Orang	- Orang	4 Orang
4	SMA	17 Orang	14 Orang	42 Orang	75 Orang
5	SMP			20 Orang	20 Orang
6	SD			19 Orang	19 Orang
7	Tidak Tamat SD			2 Orang	2 Orang
Jumlah Keseluruhan					168 Orang

Sumber : Data Kasubbag Umum dan Kepegawai Kecamatan Siantar Barat Tahun 2025

- Data Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel 1.3.5
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Tahun 2025

NO	URAIAN	JUMLAH
1	PNS	
	Golongan IV	- Orang
	Golongan III	54 Orang
	Golongan II	9 Orang
2	PPPK	
	Golongan IX	4 Orang
	Golongan VII	1 Orang
	Golongan V	14 Orang
3	THL	
	Petugas Kebersihan	86 Orang
	Petugas Jaga Malam	- Orang
	Jumlah ASN + PPPK + THL	168 Orang

Sumber : Data Kasubbag Umum dan Kepegawai Kecamatan Siantar Barat Tahun 2025

Dari data tersebut di atas dapat dilihat bahwa total keseluruhan ASN Kecamatan Siantar Barat ada sebanyak 168 orang. Adapun kualifikasi pendidikan tertinggi ASN adalah Strata II sebanyak 2 Orang, Strata I sebanyak 46 orang, Diploma III sebanyak 4 orang, SLTA sederajat sebanyak 75 orang, SLTP sebanyak 20 orang, SD 20 orang dan tidak tamat SD ada sebanyak 2 orang. Adapun kualifikasi ASN berdasarkan golongan adalah golongan III sebanyak 54 orang, golongan II sebanyak 9 orang, golongan IX sebanyak 4 orang, golongan VII 1 orang dan golongan V sebanyak 14 orang.

2. Sarana dan Prasarana

Jumlah sarana dan prasarana pada Kecamatan Siantar Barat antara lain:

No	Jenis Aset	Ukuran/Jumlah	Kondisi	
			Baik (unit)	Buruk (unit)
1	Tanah Bangunan Kantor Kecamatan	854 m ²	1	
2	Tanah Bangunan Kantor Kelurahan Dwikora	169 m ²	1	
3	Tanah Bangunan Kantor Kelurahan Proklamasi	600 m ²	1	
4	Tanah Bangunan Kantor Kelurahan Bantan	490 m ²	1	
5	Tanah Bangunan Kantor Kelurahan Simarito	421 m ²	1	
6	Tanah Bangunan Kantor Kelurahan Banjar	254 m ²	1	
7	Tanah Bangunan Kantor Kelurahan Teladan	223 m ²	1	
8	Tanah Bangunan Kantor Kelurahan Sipinggol-pinggol	120 m ²	1	
9	Tanah Bangunan Kantor Kelurahan Timbang Galung	149 m ²	1	
10	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kecamatan	9 (854 m ²)	9	
11	Kendaraan Roda 4	2	2	
12	Kendaraan Roda 2	10	9	1
13	Kendaraan Roda 3/Betor	3	3	

No	Jenis Aset	Ukuran/Jumlah	Kondisi	
			Baik (unit)	Buruk (unit)
14	Generator	2	2	
15	P.C Unit	19	17	2
16	Laptop	8	6	2
17	Note Book	10	10	
18	Printer	23	22	1
19	Camera	10	9	1
20	Proyektor	2	2	
21	Tripod Camera	1	1	
22	Mesin Perekan Stensil Double Folio	2	2	
23	Alat Komunikasi lain	4	2	2
24	Alat Tenis Meja	6	6	
25	Alat Tenis	5	5	
26	Alat Olahraga lainnya	2	2	
27	Permainan dan Olahraga	63	63	
28	Gerobak Dorong	11	4	7
29	Gerobak Tarik	2	2	
30	Mesin Ketik Manual	16	13	3
31	Mesin Jahit	2	1	1
32	Mesin Potong Rumput	7	6	1
33	Kursi Tamu	29	29	
34	Sofa	3	2	1
35	Kursi Rapat	354	115	199
36	Kursi Putar	73	63	10
37	Kursi Biasa	90	90	
38	Bangku Tunggu	3	3	
39	Kursi Plastik	14	14	
40	Kursi Kayu	6	6	
41	Kursi Tangan	31	17	14
42	Papan Visual	6	3	3
43	Papan Nama Instansi	38		2

No	Jenis Aset	Ukuran/Jumlah	Kondisi	
			Baik (unit)	Buruk (unit)
44	Papan Pengumuman	11	10	1
45	Papan Tulis	14	14	1
46	White Board	11	8	3
47	Meja Besi	1	1	
48	Meja Tulis	3	3	
49	Meja Podium	2	2	
50	Meja Panjang	2	2	
51	Meja Kayu Rotan	62	50	12
52	Meja Biro	49	27	22
53	Meja Komputer	7	7	
54	Meja Panjang	2	2	
55	Timbangan Badan	1	1	
56	AC	4	4	
57	Kipas Angin	2	2	
58	Televisi	4	2	
59	Soundsystem	3	3	
60	Wireless	9	8	
61	Stabilisator	13	13	
62	Handycam	1	1	
63	Pesawat Telepone	1	1	
64	Handy Talky	1		
65	Rak Kayu	8	5	3
66	Lemari Kayu	31	17	14
67	Filling Cabinet	35	30	5
68	Band Kas	1	1	
69	Alat Pemotong Kertas	1	1	

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik

lokal, nasional, dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Kesatuan RI. Dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, Instansi lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. Analisa terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah penting untuk memperhitungkan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threat*) yang ada. Analisa terhadap unsur-unsur tersebut merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

1.2. Aspek Strategis Organisasi

Kecamatan Siantar Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani urusan otonom daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintah lainnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat memiliki fungsi:

1.2.1. Tugas dan Fungsi Camat

Berdasarkan peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 27 tahun 2022 pasal 336, Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Meyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Wali kota;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan dan prasarana fasilitas pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kota yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari Wali kota;
- b. Pelayanan penyelenggaraan pemerintah kecamatan.

1.2.2. Tugas Sekretaris Camat dan Unsur Staf Lainnya

1.2.2.1. Sekretaris Camat

Sekretariat kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi pemerintahan kecamatan.

Penjabaran tugas Sekretaris Kecamatan meliputi:

- a. Penyusunan rencana/program, pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya;
- b. Pengurusan administrasi keuangan kecamatan;
- c. Pengurusan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan

dan rumahtangga kecamatan;

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Camat dibantu oleh :

1. Sub Bagian Program dan Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinir perencanaan, penyusunan, evaluasi dan pelaporan program serta pengelolaan administrasi keuangan.

Penjabaran tugas Sub Bagian Program dan Keuangan meliputi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana, program kerja dan kegiatan di lingkungan kecamatan;
- b. Menghimpun, mengolah dan menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan kecamatan;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan kecamatan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan kecamatan;
- e. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan kecamatan yang meliputi penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi anggaran serta perbendaharaan;
- f. Mengkoordinasikan dan menyusun serta mengendalikan pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran di lingkungan kecamatan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris camat sesuai bidang tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan

pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan serta menyelenggarakan program kepegawaian, pengembangan dan pemberdayaan pegawai di lingkungan kecamatan.

Penjabaran tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi:

- a. Mengelola administrasi surat menyurat, penggandaan dan pengarsipan tata laksana rumah tangga kecamatan;
- b. Mengelola administrasi perlengkapan yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian/pemanfaatan, pemeliharaan dan inventarisasi barang perlengkapan/perbekalan rumah tangga kecamatan;
- c. Melaksanakan koordinasi kegiatan rumah tangga kecamatan serta membina hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan di lingkungan kecamatan;
- d. Mengelola administrasi dan pembinaan kepegawaian termasuk perencanaan kebutuhan dan pengembangan kepegawaian di lingkungan kecamatan;
- e. Menyusun perencanaan kebutuhan dan pengembangan/diklat kepegawaian di lingkungan kecamatan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris camat sesuai bidang tugas dan fungsinya.

1.2.2.2. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintah kecamatan.

Penjabaran tugas Kepala Seksi Pemerintahan meliputi :

- a. Menyusun program dan membina penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan kelurahan;
- b. Menyusun program dan melaksanakan pembinaan administrasi kependudukan;
- c. Menyusun program dan melaksanakan pembinaan sosial politik, Ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa;

- d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- e. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah kelurahan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2.2.3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan ketahanan dan sosial budaya masyarakat, pembangunan fisik, perekonomian rakyat, produksi, distribusi, lingkungan hidup dan pemanfaatan teknologi tepat guna dan sumber daya lainnya serta kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan di wilayah kecamatan.

Penjabaran tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga meliputi:

- a. Merumuskan dan menyusun rencana program, kegiatan dan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan yang meliputi ketahanan sosial budaya masyarakat, usaha ekonomi rakyat, teknologi tepat guna dan sumber daya alam;
- b. Menyusun program dan pembinaan perekonomian masyarakat kelurahan, produksi dan distribusi;
- c. Menyusun program dan pembinaan lingkungan hidup;
- d. Menyusun program, melaksanakan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat;

- e. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olahraga;
- f. Melakukan pembinaan dan pelayanan terhadap masyarakat, memberikan petunjuk, mengawasi pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan yang meliputi ketahanan sosial budaya masyarakat, usaha ekonomi rakyat, teknologi tepat guna dan sumber daya alam;
- g. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan;
- h. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- i. Melaksanakan, membina dan mengawasi serta mengevaluasi keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- j. Melaksanakan kegiatan-kegiatan olahraga daerah, dan mengutus masyarakat yang berprestasi menurut bidang keolahragaan masing-masing;
- k. Memfasilitasi kegiatan olahraga yang berada di lingkungan kecamatan;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2.2.4. Seksi Keamanan, Ketertiban Dan Kebersihan

Seksi Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keamanan dan ketertiban umum, penyapuan jalan, pengumpulan sampah, pembabatan dan pengikisan rumput di beram-beram jalan, pembersihan selokan/parit-parit dan penggalian sedimen di jalan-jalan atau gang-gang di luar jalan arteri dan kolektor serta mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang diperbantukan di kecamatan.

Penjabaran tugas Kepala Seksi Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan meliputi:

- a. Menyusun program dan menyelenggarakan pembinaan keamanan, ketertiban dan kebersihan;
- b. Menyusun program dan menyelenggarakan pembinaan Polisi Pamong Praja;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan, ketertiban dan kebersihan;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan penyapuan jalan, pengumpulan sampah, pembabatan dan pengikisan rumput di berm-berm jalan, pembersihan selokan/parit-parit dan penggalian sedimen di jalan-jalan atau gang-gang diluar jalan arteri dan kolektor dan menempatkannya pada TPSS/kontainer;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2.2.5. Seksi Pelayanan Umum dan Pendapatan

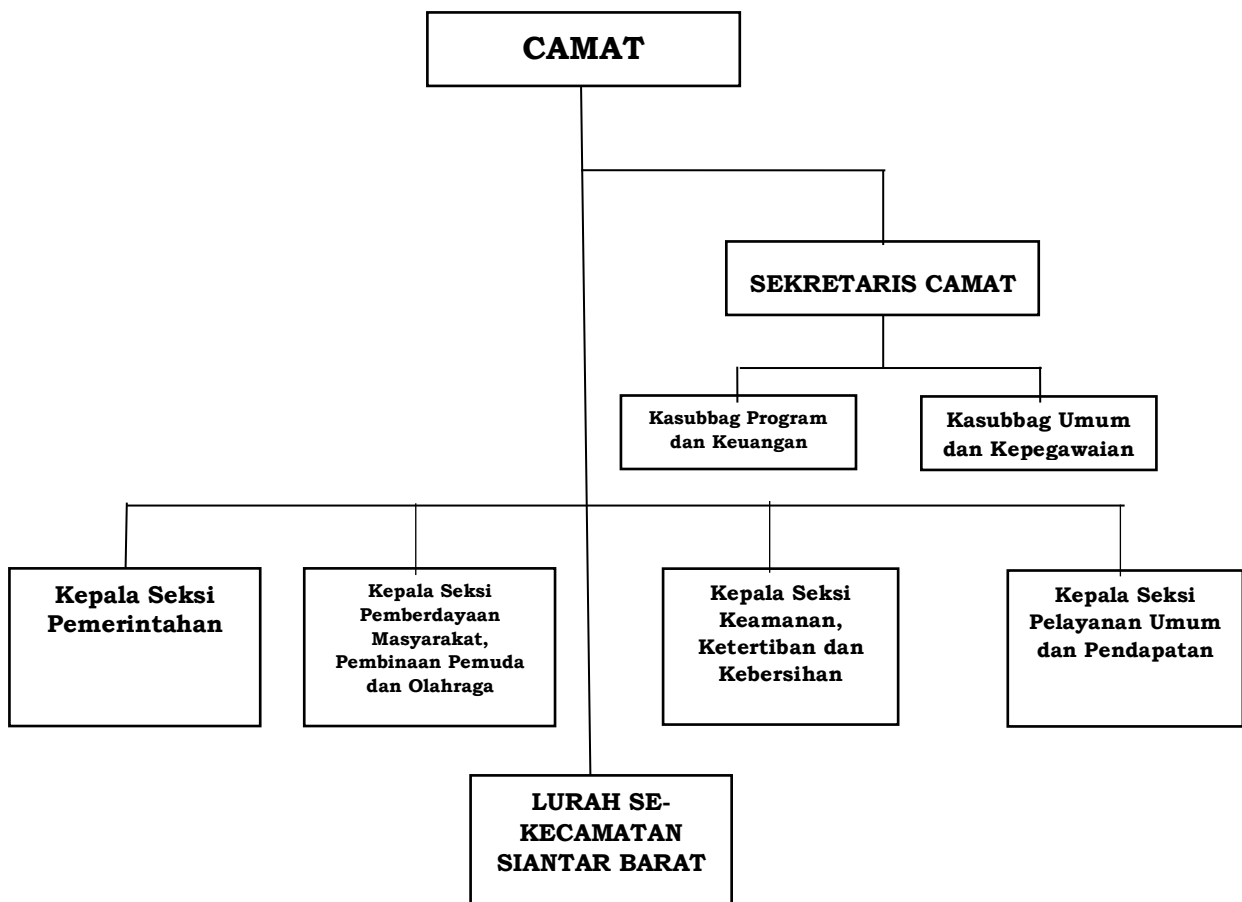
Seksi Pelayanan Umum dan Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan dan melakukan pelayanan umum, mendata dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

Penjabaran tugas Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Pendapatan meliputi:

- a. Menyusun program, membina pelayanan dan bantuan sosial, dan melaksanakan pembinaan masyarakat;
- b. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- c. Melaporkan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;

- d. Melaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penagihan PBB serta retribusi ruang terbuka;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pendapatan;
- h. Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi terhadap potensi dan sumber-sumber pendapatan daerah di wilayah kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Gambar 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN SIANTAR BARAT



1.3. Permasalahan Umum (Isu Strategis)

Adapun Permasalahan Umum (isu strategis) dalam mencapai visi dan misi Wali Kota untuk Kecamatan Siantar Barat tidak ada.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Ikhtisar Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Perjanjian Kinerja, akan terwujud komitmen penerima Amanah dan kesepakatan antara penerima (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) dan Pemberi Amanah (Wali Kota Pematangsiantar) atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Siantar Barat disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Siantar Barat Tahun 2022-2027, Dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025.

Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja utama tahun 2025, dapat digambarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1.
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Kecamatan Siantar Barat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	B
		Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	1
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	Persentase pembersihan dan pengangkutan sampah lingkungan sampai ke TPSS	100%
		Persentase gangguan trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pengelolaan Persampahan	1.585.266.367	APBD
2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	817.096.210	APBD
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.684.115.169	APBD
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.647.655.286	APBD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	212.952.728	APBD
Total		12.947.085.760	

2.2. Indikator Kinerja Utama

Menurut PERMENPAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2027, yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah: ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Sesuai dengan Keputusan Camat Siantar Barat Kota Pematangsiantar Nomor: 060/32-SB/I/2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tahun 2025, dimana telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Kecamatan Siantar Barat yaitu:

Tabel 2.2.
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN SIANTAR BARAT
TAHUN 2022-2027

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	URAIAN/ DEFENISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Mendukung Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Permenpan RB RI Nomor 88 Tahun 2021)	Evaluasi AKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Penilaian Inspektorat	B
			Jumlah Inovasi yang dihasilkan oleh Kecamatan Siantar Barat	Jumlah Inovasi yang dihasilkan oleh Kecamatan Siantar Barat	Laporan	1
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pembersihan dan Pengangkutan sampah lingkungan sampai ke TPSS	Menghitung Persentase Jumlah Kelurahan yang sampahnya telah terangkut di TPSS	$\frac{\text{Jumlah Kelurahan yang sampahnya diangkut}}{\text{Jumlah semua Kelurahan}} \times 100$	Laporan Mandor Kebersihan, Monotoring Kecamatan	100%
		Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	Menghitung Persentase Gangguan Trantibum yang telah diselesaikan dibagi dengan Jumlah Gangguan Trantibum yang masuk dikalikan dengan 100%	$\frac{\text{Jumlah Gangguan Trantibum yang telah diselesaikan}}{\text{Jumlah Gangguan Trantibum yang masuk}} \times 100$	Laporan	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mendukung (Kepmenpan No. 25 Tahun 2024)	Skor Penilaian Pelayanan pada Perangkat Daerah sesuai Target Responden	Kuesioner	94

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sesuai dengan Perjanjian Kinerja
Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025	
			TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	B	B
		Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	1	1
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pembersihan dan Pengangkutan Sampah Lingkungan sampai ke TPSS	100	100
		Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di Wilayah Kecamatan	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93	93,14

Capaian Kinerja pada Kecamatan Siantar Barat tahun 2025 pada masing-masing indikator kinerja dapat dilihat sebagai berikut:

1. Nilai AKIP Perangkat Daerah nilai ini diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Pematangsiantar, dan pada Tahun 2025 Kecamatan Siantar Barat memperoleh predikat B dengan skor 64,64. Dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Perencanaan Kinerja dengan skor 22,23
 - b. Pengukuran Kinerja dengan skor 20,06
 - c. Pelaporan Kinerja dengan skor 7,32
 - d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan skor 14,93

2. Persentase Pembersihan dan Pengangkutan Sampah Lingkungan sampai ke TPSS sampai Tahun 2025 yaitu 100% berdasarkan pelaksanaan yang dilakukan selama Tahun 2025. Persentase ini diperoleh dari hasil jumlah kelurahan yang sampahnya diangkut dibagi jumlah seluruh kelurahan dikalikan 100%.

$$\text{Formula Perhitungan} = \frac{8 \text{ Kelurahan yang sampahnya diangkut}}{8 \text{ Kelurahan}} \times 100 = 100\%$$

Dokumentasi Pembersihan dan Pengangkutan Sampah



3. Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di Wilayah Kecamatan Siantar Barat Tahun 2025 yaitu 100% berdasarkan laporan trantibum yang masuk dan terselesaikan tahun 2025 sebanyak 33 jumlah Gangguan Trantibum yang masuk dan semua gangguan sudah terselesaikan sehingga realisasi capaian tahun 2025 sebesar 100%.

$$\text{Formula} = \frac{33 \text{ Gangguan Trantibum yang telah diselesaikan} \times 100}{33 \text{ Gangguan Trantibum yang masuk}} = 100\%$$

Rekapitulasi Gangguan Trantibum Tahun 2025

Bulan	Keterangan	Triwulan	
Januari	Ada 3 gangguan dibulan ini yaitu Kegiatan yang mengganggu ketenangan warga dan Pelanggaran kebersihan dan ketertiban lingkungan	TW 01	Di triwulan satu ini ada 4 gangguan trantibum yang sudah ditindak lanjuti di kelurahan yang ada di Kecamatan Siantar Barat
Pebruari	Ada satu gangguan yaitu Kegiatan Tanpa Izin di kelurahan		
Maret	Nihil gangguan di kelurahan dan kecamatan		
April	Ada 2 gangguan Kegiatan Tanpa Izin dan Kegiatan yang mengganggu ketenangan warga	TW 02	Di triwulan dua ini ada 7 gangguan trantibum yang sudah ditindak lanjuti di kelurahan yang ada di Kecamatan Siantar Barat
Mei	Terlaksananya penyelesaian pengaduan masyarakat yang berada di dua kelurahan yaitu kelurahan dwikora dan Proklamasi sementara untuk di enam kelurahan lainnya tidak ada pengaduan masyarakat untuk di bulan ini		
Juni	Terlaksananya penyelesaian pengaduan masyarakat yang berada di dua kelurahan yaitu ada 2 kelurahan yaitu Kegiatan yang mengganggu ketenangan warga dan Pelanggaran kebersihan dan ketertiban lingkungan		
Juli	Kegiatan Yang mengganggu ketenangan warga ada 2, kegiatan tanpa izin ada 2	TW 03	Di triwulan tiga ini ada 8 gangguan trantibum yang sudah ditindak lanjuti di kelurahan yang ada di Kecamatan Siantar Barat
Agustus	Ada nya 3 ganguan di bulan ini yaitu Pelanggaran kebersihan dan ketertiban lingkungan		
September	Gangguan di bulan ini ada 1 gangguan di kelurahan dwikora yaitu jenis gangguan lainnya		
Oktober	Gangguan di bulan ini ada 4 gangguan di kelurahan teladan dan kelurahan dwikora yaitu jenis gangguan lainnya dan pelanggran kebersihan	TW 04	Di triwulan keempat ini ada 14 gangguan trantibum yang sudah ditindak lanjuti di kelurahan yang ada di Kecamatan Siantar Barat
November	Gangguan di bulan ini ada 3 gangguan di kelurahan dwikora dan simarito yaitu jenis gangguan lainnya dan pelanggran kebersihan		
Desember	Gangguan di bulan ini ada 7 gangguan di kelurahan		

Dokumentasi Gangguan Trantibum

1. Adanya pencurian besi jembatan di gang Salak kelurahan Bantan dan telah ditindaklanjuti bersama Bhabinkamtibmas dan dilakukan olah TKP



2. Hasil monitoring wilayah atas aduan warga dan mendapati adanya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang sering buang air sembarangan sehingga terganggunya kenyamanan warga dan telah ditindaklanjuti untuk menjaga kenyamanan warga dilingkungan kelurahan dwikora dengan menyurati Dinas Sosial dengan tembusan ke Satpol PP serta Kecamatan.



4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) nilai ini diperoleh dari skor Penilaian Pelayanan pada Perangkat Daerah sesuai target responden. Pada tahun 2025 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Siantar Barat sebesar 93,14% dengan total responden ada sebanyak 240 responden. Berdasarkan survey yang dilakukakan selama tahun 2025 yaitu bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2025 dengan memberikan daftar kuisioner secara random kepada masyarakat yang berurusan langsung ke kantor Camat Siantar Barat untuk 220 responden dari 8 kelurahan yang ada di kecamatan siantar barat dengan mengajukan 10 pertanyaan menyangkut tingkat kepuasan pelayanan yang diberikan oleh aparatur Kecamatan Siantar Barat, didapat hasil pengklasifikasian respon dari masyarakat yaitu 220 orang menyatakan tingkat kepuasan atas pelayanan aparatur Kecamatan Siantar Barat adalah sangat puas.

Daftar pencapaian target IKM Tahun 2025

Periode	TW 01			TW 02			TW 03			TW 04			Rata-rata IKM
	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
Skor	83,29	84,7	93,91	93,78	93,5	93,64	94,6	95,7	94,88	96,25	96,66	96,8	93,14

5. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah merupakan inovasi yang diciptakan oleh kepala OPD. Tahun 2025 Target Inovasi Perangkat Daerah sudah tercapai 100%. Inovasi Camat Siantar Barat pada tahun 2025 diberi nama Sedekah Sampah Untuk Stunting (Desaku). Inovasi DESAKU merupakan sebuah terobosan yang ditujukan untuk mengatasi atau meminimalkan dampak permasalahan sampah dan menurunkan jumlah anak yang mengalami stunting di Kecamatan Siantar Barat. DESAKU mengusung konsep “mengonversikan sampah yang masih bermanfaat atau bernilai jual menjadi uang untuk membeli makanan tambahan bagi anak yang mengalami stunting yang ada di lingkungan Kecamatan Siantar Barat.

3.1.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				
			2025	2025	2024	2023	2022	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	B	B	B	B	-	
		Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	1	1	1	-	-	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	Persentase pembersihan dan pengangkutan sampah lingkungan sampai ke TPSS	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase gangguan trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93	93,14	92,17	80,94	70,00	

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian Kinerja Kecamatan Siantar Barat Tahun 2025 realisasi kinerja yaitu untuk Nilai AKIP Perangkat Daerah pada tahun 2025 mencapai target B, tahun 2024 B dan tahun 2023 B. Untuk Inovasi pada tahun 2025 terealisasi 1, tahun 2024 sebanyak 1 inovasi dan untuk tahun 2023, 2022 belum ada inovasi. Persentase pembersihan dan pengangkutan sampah lingkungan sampai ke TPSS pada tahun 2025 mencapai target 100%, tahun 2024 100%, tahun 2023 100% dan tahun 2022 100%. Persentase gangguan trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan pada tahun 2025 mencapai target 100%, tahun 2024 100%, tahun 2023 100% dan tahun 2022 100%.

Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 terealisasi sebesar 93,14, tahun 2024 sebesar 92,17, tahun 2023 realisasinya sebesar 80,94 dan tahun 2022 sebesar 70,00.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI 2025	TARGET PROYEKSI	
					2026	2027
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	B	B	B	B
		Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	1	1	1	1
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	Persentase pembersihan dan pengangkutan sampah lingkungan sampai ke TPSS	100%	100%	100%	100%
		Persentase gangguan trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	100%	100%	100%	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93	93,14	88	90

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional untuk Kecamatan Siantar Barat tidak ada.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

Untuk tahun 2025 Kecamatan Siantar Barat memiliki 5 (lima) indikator yang berhasil direalisasikan mencapai target kinerja. Adapun keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Tersedianya Anggaran yang memadai;
2. Adanya Sarana dan Prasarana yang memadai;
3. Pelaksanaan Tupoksi dan Koordinasi yang efektif.

Adapun keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut di atas tetap mengalami beberapa kendala/hambatan yaitu:

1. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung baik di kantor lurah maupun di kantor camat
2. Tidak memadainya kualitas dan kuantitas TPS dan peralatan kebersihan yang masih kurang
3. Adanya peningkatan volume sampah di kelurahan Dwikora yang disebabkan aktivitas pasar Horas yang cukup tinggi
4. Adanya kegiatan pemberdayaan dana kelurahan yang belum optimal di kelurahan Dwikora
5. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam musyawarah pembangunan daerah
6. Masih adanya ASN yang belum memiliki kemampuan yang memadai dalam penggunaan teknologi informasi

Alternatif Solusi yang akan dilakukan:

1. Mengusulkan dalam APBD Tahun 2026 dalam hal pengadaan sarana dan prasarana pendukung bagi pelaksanaan tugas pemerintahan
2. Melakukan analisa mendalam terhadap tingkat kebutuhan TPS dan sarana Prasarana Kebersihan dan mengusulkan melalui APBD untuk mengadakannya
3. Berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan

penyesuaian jadwal terkait pengangkutan sampah yang ada di setiap kelurahan

4. Perlunya pemahaman kelompok masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan
5. Memberikan pengarahan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah
6. Menyelenggarakan pelatihan internal atau bimbingan teknis IT secara berkala dan juga mengusulkan kebutuhan diklat secara resmi kepada BKPSDM

3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut disampaikan analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya untuk Tahun Anggaran 2025 pada tabel 3.1.6 berikut ini.

Tabel 3.4
Realisasi Program Per Indikator Kinerja
Kecamatan Siantar Barat Tahun 2025

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		
						Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	B	B	92,43%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.684.115.169	8.352.970.821	96,19%
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	34.984.230	33.800.106	96,62%
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah	17.492.115	17.155.557	98,08%
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.492.115	16.644.549	95,15%
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.050.809.117	6.802.632.586	96,48%
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.050.809.117	6.802.632.586	96,48%
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	778.161.057	731.910.608	94,06%
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.080.530	47.370.217	96,52%
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	217.623.205	200.515.395	92,14%
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	311.813.636	305.563.020	98,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.495.950	39.129.750	96,63%					

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		
						Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
					Penyediaan Barang dan Penggandaan	18.907.840	18.579.701	98,26%
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93.786.000	75.980.500	81,01%
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	46.453.896	44.772.025	96,38%
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	639.413.415	620.565.206	97,05%
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.491.520	6.175.247	95,13%
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	76.226.400	67.324.659	88,32%
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	556.695.495	547.065.300	98,27%
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180.747.350	164.062.315	90,77%
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.497.350	104.946.046	87,09%
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.030.000	16.760.105	98,42%
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	43.220.000	42.356.164	98,00%
Meningkatkan Kesehatan Balita Melalui Sedekah Sampah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	1	1	100%				
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pembersihan dan Pengangkutan Sampah Lingkungan sampai ke TPSS	100%	100%	100%	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.585.266.367	1.560.187.483	98,42%
					Pengelolaan Sampah	1.585.266.367	1.560.187.483	98,42%
					Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Penrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.585.266.367	1.560.187.483	98,42%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di Wilayah Kecamatan	100%	100%	100%				
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan	100	100	100%	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	212.952.728	209.395.456	98,33%
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	212.952.728	209.395.456	98,33%

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		
						Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	161.489.558	158.903.844	98,40%
					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	51.463.170	50.491.612	98,11%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	94,88	105,42				
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase PKK Aktif, Persentase Posyandu Aktif, Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100%	100%	100%	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	817.096.210	724.902.084	88,72%
					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten /Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	817.096.210	724.902.084	88,72%
					Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	817.096.210	724.902.084	88,72%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Usulan Masyarakat yang Diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.647.655.286	1.546.332.038	93,85%
	Persentase Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musrenbang	100	100	100%	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.647.655.286	1.546.332.038	93,85%
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100	100	100%	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	47.655.286	46.332.038	97,22%
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8	8	8	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.600.000.000	1.500.000.000	93,75%
Total						12.947.085.760	12.393.787.882	95,73%

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Anggaran
Kecamatan Siantar Barat Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Capaian Kinerja			Capaian Anggaran		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	B	B	100%	8.684.115.169	8.352.970.821	96,19%
		Jumlah Inovasi Perangkat Daerah		1	1	100%			
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	Persentase pembersihan dan pengangkutan sampah lingkungan sampai ke TPSS	Program Pengelolaan Persampahan	100%	100%	100%	1.585.266.367	1.560.187.483	98,42%
		Persentase gangguan trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	212.952.728	209.395.456	98,33%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	93	93,14	100,15	817.096.210	724.902.084	88,72%
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				1.647.655.286	1.546.332.038	93,85%

Tabel 3.6
Efisiensi Per Indikator Kinerja
Kecamatan Siantar Barat Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	100,00	96,19	3,81
		Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	100,00	98,42	1,58
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	Persentase pembersihan dan pengangkutan sampah lingkungan sampai ke TPSS	100,00	98,42	1,58
		Persentase gangguan trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	100,00	98,33	1,67
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100,15	93,85	6,15

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa Kecamatan Siantar Barat untuk Tahun 2025 dalam mencapai kinerjanya terdapat efisiensi antara capaian kinerja dengan capaian anggaran yaitu untuk mencapai nilai AKIP terdapat efisiensi sebesar 3,81%, untuk inovasi efisiensi sebesar 1,58%, untuk Persentase pembersihan dan pengangkutan sampah lingkungan sampai ke TPSS terdapat efisiensi sebesar 1,58%, untuk Persentase gangguan trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan terdapat efisiensi sebesar 1,67% dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terdapat efisiensi sebesar 6,15% walaupun capaian kinerja untuk IKM sebesar 100,15% untuk menghitung efisiensi capaian kinerja tetap dianggap 100% ($100,00 - 93,85 = 6,15$).

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kecamatan Siantar Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025 melaksanakan 5 indikator kinerja, 5 Program dan 9 Kegiatan yaitu:

1. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Untuk mencapai nilai AKIP Kecamatan Siantar Barat didukung oleh Program Penunjang Urusan Kabupaten/Kota dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

- Meningkatkan realisasi anggaran dari sisa pagu anggaran
- Menyusun Dokumen Perencanaan Kecamatan Siantar Barat
- Menyusun Dokumen Evaluasi Kecamatan Siantar Barat

2. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah

Untuk mencapai indikator Inovasi didukung oleh program Pengelolaan Persampahan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

- Melakukan pengumpulan sampah yang berasal dari ASN, dimana seluruh ASN Kecamatan Siantar Barat membawa sampah yang bermanfaat dari rumah ke kantor camat setiap hari senin
- Melakukan pengumpulan sampah dari masyarakat, pengusaha kafe dan restoran

- Melakukan pemilahan sampah yang ada di bank sampah oleh petugas untuk kemudian dijual
 - Hasil penjualan sampah dibelikan makanan tambahan yang bergizi dan kemudian dibagikan untuk anak penderita stunting
3. Persentase pembersihan dan pengangkutan sampah lingkungan sampai ke TPSS

Untuk mencapai indikator persentase pembersihan dan pengangkutan sampah lingkungan sampai ke TPSS didukung oleh Program Pengelolaan Persampahan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

- Melakukan monitoring kegiatan pembersihan dan pengangkutan sampah di semua kelurahan
 - Melaksanakan pembersihan beram jalan dan sedimen
 - Melaksanakan gotong royong di setiap kelurahan
4. Persentase gangguan trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan

Untuk mencapai indikator Persentase gangguan trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan didukung oleh program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

- Memberikan pelayanan gangguan trantibum terhadap aduan yang ada di kecamatan maupun kelurahan
- Melakukan edukasi melalui himbauan kepada pedagang kaki lima
- Memantau dan menindak lanjuti laporan yang ada di aplikasi SP4N-LAPOR

5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Untuk mencapai indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) didukung oleh program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

- Melaksanakan survey kepuasan masyarakat dengan mengarahkan responden yakni masyarakat yang dilayani untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di kelurahan maupun di kecamatan.

Seluruh program kegiatan tersebut ditujukan untuk mencapai beberapa Indikator Kinerja sebagaimana tercantum dalam Renstra

Kecamatan Siantar Barat Tahun 2022-2027 dengan target yang sudah ditetapkan.

3.2 Realisasi Anggaran

Tabel 3.7
Program dan Kegiatan serta Realisasi Tahun 2025

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu P. APBD Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Capaian Kinerja (%)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Sampah	1.585.266.367	1.560.187.483	98,42%
	Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah yang Tertangani	1.585.266.367	1.560.187.483	98,42%
	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.585.266.367	1.560.187.483	98,42%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase PKK Aktif, Persentase Posyandu Aktif, Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	817.096.210	724.902.084	88,72%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten /Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PKK Aktif, Persentase Posyandu Aktif, Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	817.096.210	724.902.084	88,72%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu P. APBD Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Capaian Kinerja (%)
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	817.096.210	724.902.084	88,72%
	UNSUR KEWILAYAHAN				
	KECAMATAN				
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	8.684.115.169	8.352.970.821	96,19%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.984.230	33.800.106	96,62%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	17.492.115	17.155.557	98,08%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	17.492.115	16.644.549	95,15%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.050.809.117	6.802.632.586	96,48%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.050.809.117	6.802.632.586	96,48%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		778.161.057	731.910.608	94,06%
	Penyediaan Komponen dan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	49.080.530	47.370.217	96,52%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	217.623.205	200.515.395	92,14%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	311.813.636	305.563.020	98,00%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40.495.950	39.129.750	96,63%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	18.907.840	18.579.701	98,26%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93.786.000	75.980.500	81,01%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	46.453.896	44.772.025	96,38%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	639.413.415	620.565.206	97,05%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.491.520	6.175.247	95,13%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu P. APBD Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Capaian Kinerja (%)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	76.226.400	67.324.659	88,32%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	556.695.495	547.065.300	98,27%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	180.747.350	164.062.315	90,77%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	120.497.350	104.946.046	87,09%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17.030.000	16.760.105	98,42%
	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	43.220.000	42.356.164	98,00%
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Masyarakat yang di Akomodir dalam Perencanaan Pembangunan	1.647.655.286	1.546.332.038	93,85%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi dalam forum Musrenbang	1.647.655.286	1.546.332.038	93,85%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	47.655.286	46.332.038	97,22%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.600.000.000	1.500.000.000	93,75%
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan	212.952.728	209.395.456	98,33%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahn Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	212.952.728	209.395.456	98,33%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu P. APBD Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Capaian Kinerja (%)
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	161.489.558	158.903.844	98,40%
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	51.463.170	50.491.612	98,11%
Total			12.947.085.760	12.393.787.882	95,73%

Berdasarkan data tersebut di atas, pada tahun anggaran 2025 untuk program kegiatan Kecamatan Siantar Barat yang ditujukan untuk secara langsung mencapai target keuangan dimana dari alokasi anggaran sebesar Rp.12.947.085.760,- yang terrealisasi sebesar Rp.12.393.787.882,- atau sebesar 95,73%.

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Siantar Barat Tahun 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah secara umum telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Capaian kinerja pada sebagian besar urusan pemerintahan telah memenuhi target indikator.

Dari sisi pengelolaan anggaran, realisasi keuangan dan fisik menunjukkan progres yang cukup baik dengan kecenderungan meningkat pada tahun berikutnya. Upaya koordinasi lintas perangkat daerah, penyesuaian terhadap regulasi, serta penguatan perencanaan dan pengawasan menjadi faktor pendukung utama dalam pencapaian kinerja tersebut.

Berdasarkan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun anggaran 2025 maka dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi terhadap 5 program diperoleh nilai rata-rata sebesar 95,73%.
2. Hasil evaluasi terhadap 9 kegiatan/22 Sub kegiatan diperoleh nilai rata-rata sebesar 95,73%.

IV.2 Saran

Dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan program dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Siantar Barat tahun 2025, diperlukan koordinasi antar perangkat pelaksana harus diperkuat agar sinkronisasi program tetap terjaga dan pelaksanaan dapat berlangsung lebih efektif. Selain itu, monitoring dan evaluasi berkala harus dioptimalkan untuk mengidentifikasi hambatan sejak dini dan memastikan tindak lanjut yang lebih cepat dan terukur.

Strategi pelaksanaan program yang belum mencapai target juga perlu disesuaikan, termasuk melalui penjadwalan ulang kegiatan dan penguatan sumber daya pelaksana. Pengelolaan anggaran perlu dimantapkan agar serapan tidak menumpuk di akhir periode, dan kapasitas aparatur pelaksana juga penting untuk terus ditingkatkan melalui pembinaan dan pemahaman regulasi. Setiap temuan atau catatan evaluatif dari internal maupun eksternal perlu ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang jelas sehingga target tahunan dapat tercapai secara optimal. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang adalah:

- Membuat perencanaan kinerja dan anggaran dengan lebih cermat dan revisi anggaran dan kegiatan dilakukan sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
- Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Kecamatan Siantar Barat.
- Pimpinan memberikan pengarahan, bimbingan, serta melakukan pendekatan langsung kepada pegawai yang melanggar aturan.
- Mengusulkan dalam APBD Tahun 2026 dalam hal pengadaan sarana dan prasarana pendukung (komputer, printer, ruang tunggu nyaman, AC) untuk mendukung kenyamanan pegawai dan masyarakat.
- Berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan penyesuaian jadwal terkait pengangkutan sampah yang ada di setiap kelurahan.
- Melakukan evaluasi secara kinerja dalam mengukur capaian target (indikator kinerja sasaran) secara rutin, serta membandingkan target dengan realisasi.
- Melakukan pembinaan kepada Pokmas dalam melaksanakan Dana Kelurahan.

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Siantar Barat Tahun 2025, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi bagi semua pihak. Laporan Lakip ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau informasi akuntabilitas

kinerja Kecamatan Siantar Barat kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Pematangsiantar.

Pematangsiantar, Pebruari 2025
CAMAT SIANTAR BARAT



HERWAN A.R.SARAGIH, SH
PENATA TK I

NIP. 19711225 200604 1 008

LAMPIRAN